

BAB IV

**ANALISIS PENGARUH KEMENANGAN PARTAI LIKUD TERHADAP
UPAYA PERUNDINGAN DAMAI ISRAEL-PALESTINA PASCA PEMILU
TAHUN 2013**

Sudah kurang lebih 69 tahun Israel merdeka dan berdiri sebagai sebuah negara yang utuh. Sejak awal berdirinya hingga sekarang sedikitnya sudah 12 orang tampil sebagai perdana menteri Israel, sedangkan untuk pergantian perdana menteri telah dilakukan sebanyak 20 kali. Perdana Menteri saat ini diduduki oleh Benyamin Netanyahu dari Partai Likud. Setiap perdana menteri Israel mempunyai tujuan sama yaitu cita-cita Zionis akan Israel Raya (Eretz Israel) dengan melakukan agresi terhadap Palestina terutama di Jalur Gaza dan Tepi Barat. Hal ini jugalah yang menjadi cita-cita seorang Benyamin Netanyahu sebagai Perdana Menteri. Pada bab ini akan dibahas mengenai karakteristik kebijakan Israel dibawah Partai Likud terhadap perdamaian Israel Palestina yang cenderung semakin agresif. Hal ini ditandai dengan koalisi Partai Likud di Pemerintahan, penolakan Israel terhadap solusi two state solution yang ditawarkan dunia internasional dan artikulasi perdamaian yang dilakukan melalui kekerasan. Dalam bab ini juga penulis akan memaparkan implementasi perdamaian Israel-Palestina pada pemerintahan Partai Likud pasca kemenangan dalam pemilu tahun 2013.

A. Orientasi Pemerintahan Konservatif Israel dibawah kepemimpinan Partai Likud

Apabila kita lihat dari tahapan konflik, pada masa pemerintahan Yitzak Rabin, konflik Israel-Palestina sudah masuk pada tahapan pasca konflik. Tahapan pasca konflik

diindikasikan dengan berakhirnya konfrontasi kekerasan, turunnya tingkat eskalasi, dan terjalinnya hubungan kepada yang lebih normal diantara kedua pihak. Tahapan ini ditandai dengan ditandatanganinya perjanjian damai Oslo pada tahun 1993 baik oleh pihak Israel maupun PLO. Namun jika permasalahan yang ada tidak dapat diatasi dengan baik, tahapan ini sering kembali lagi menjadi situasi konflik. Hal ini terjadi ketika politik di Israel mengalami perubahan *decission making actor* dalam pemerintahan. (Rahmanillah 2009)

Pada Tahun 1996, Benjamin Netanyahu dari partai konservatif Likud berhasil menggantikan posisi Shimon Peres yang berasal dari Partai Buruh sebagai Perdana Menteri. Berubahnya aktor ini menimbulkan perubahan kebijakan dalam penanganan konflik Israel-Palestina. Jika pada masa pemerintahan Partai Buruh konflik Israel-Palestina menggunakan landasan *land for peace* maka pada pemerintahan Partai Likud landasan tersebut berubah menjadi *land for security* karena pemerintahan Likud sangat mengutamakan keamanan negara Israel. Benyamin Netanyahu saat itu mengulur-ulur waktu pelaksanaan perjanjian perdamaian. Ia menolak adanya negara Palestina, agar Palestina tetap menjadi daerah otonom saja di dalam Israel bukan negara merdeka. Ia bahkan ingin membuat kontelasi baru dengan membuat pemukiman Yahudi di daerah pendudukan, bila perlu dilakukan perluasan hingga ke wilayah yang berbatasan dengan Syria dan Yordania.

Prinsip ini membuat proses perdamaian menjadi macet karena pemerintahan Likud, khususnya pada masa Ariel Sharon, karena Sharon tidak bersedia untuk duduk dalam suatu perundingan damai dengan Palestina. Likud tidak ingin memberikan konsesi sedikitpun kepada Palestina. Menurut mereka, memberikan konsesi kepada Palestina

akan menimbulkan ancaman instabilitas keamanan negara Israel. Konflik kembali ke tahapan krisis saat kelompok radikal Palestina memberikan reaksi atas perubahan kebijakan yang diterapkan oleh Israel terhadap Palestina. Mereka menggunakan instrumen kekerasan dan bunuh diri sebagai bentuk reaksi atas perilaku pemerintahan Likud. Reaksi ini muncul karena dipicu oleh kebijakan pemerintahan Likud yang dianggap merugikan bangsa Palestina. Akibat dari reaksi ini, tingkat eskalasi kembali meningkat. Kekerasan kembali menjadi instrumen dalam konflik antara Israel dan Palestina. Oleh karena itulah perdamaian antara Israel dan Palestina kembali menemukan kemacetan.

Ada dua karakteristik kebijakan yang bisa dilihat selama partai Likud menjadi aktor utama dalam pengambilan keputusan terutama terhadap Palestina, diantaranya yaitu:

1. Berorientasi kepada Keamanan untuk Kepentingan Nasional Israel

Paham konservatisme yang dimiliki oleh partai Likud berusaha untuk menjaga agar terciptanya suatu stabilitas politik yang baik dan terjaganya status quo. Konservatisme tidak terlalu menginginkan perubahan yang radikal karena hanya akan menimbulkan instabilitas. Istilah konservatif ditujukan untuk segala sesuatu yang sifatnya mempertahankan apa yang sudah berlaku dan tidak mau atau meminimalisir adanya perubahan apakah itu keadaan, kebiasaan ataupun tradisi. Biasanya orang yang bersikap konservatif disebut kolot. Mereka sangat menjaga apa yang sudah menjadi kebiasaan yang diturunkan orang-orang terdahulu. Walaupun bersedia melakukan perubahan diusahakan seminimal mungkin dan karena hal itu sangat mendesak dan harus dilakukan.

Akibatnya, konservatisme sangat enggan untuk memprakarsai perubahan. Khususnya lembaga-lembaga masyarakat yang telah lama berdiri seperti gereja (agama), struktur sosial ekonomi dan lembaga-lembaga politik yang ada harus diperhatikan dengan penuh rasa hormat dan perubahan itu haruslah dilakukan dengan hati-hati. (Rodee 1988)

Menerapkan kebijakan *land for peace* secara langsung telah menimbulkan suatu perubahan dalam hal batas wilayah negara Israel. Kebijakan ini, bagi kaum konservatif Likud telah membuka jalan bagi bangsa Palestina untuk hidup di bumi Israel. Membiarkan bangsa Palestina untuk hidup di wilayah Israel bukan hanya akan merugikan Israel yang tidak bisa membangun pemukiman Yahudi secara maksimal, tetapi juga akan mengancam keamanan nasional negara Israel yang bisa menimbulkan instabilitas dalam negeri. Hal ini menjadi alasan mengapa para pemimpin Likud seperti Menachem Begin dan Yitzhak Shamir menolak Rencana Pembagian yang di inisiasi oleh PBB pada tahun 1947 karena rencana itu tidak memberikan seluruh tanah Palestina kepada bangsa Yahudi. Begin mengatakan bahwa tanah air Israel tidak dapat dibagi-bagi. Baginya setiap usaha untuk memotong-motongnya adalah tindakan kriminal dan tidak sah. Dia juga menambahkan bahwa mereka tidak akan pernah menyetujui pembagian atas tanah air mereka. (Findley 2006)

Sejak Partai Likud didirikan, para pemimpin partai ini telah mendedikasikan hidupnya untuk menjaga seluruh tanah air bangsa Yahudi. Prioritas Likud adalah menjaga seluruh tanah air yang dijanjikan atau *Promised Land*.

“The Likud government will act with vigor to continue Jewish habitation and strengthen Israeli sovereignty in the eastern parts of the city, while emphasizing improvements in the welfare and security of the Arab residents. Despite protests from the left, the Likud government consistently

approved the continuation of Jewish living within the Old City and in 'City of David'." (Findley, Diplomasi Munafik Zionis Israel: Mengungkap Fakta Hubungan AS-Israel 2006)

Kebijakan yang berorientasi keamanan nasional juga terlihat dalam platform partai Likud. Maka dari itu, dengan menyetujui langkah *land for peace* sama saja seperti memberikan tanah Yahudi kepada bangsa Palestina dan hal tersebut akan menyulitkan bangsa Israel. Pertikaian antara bangsa Israel dan Palestina akan terjadi ketika laju perpindahan bangsa Yahudi ke Palestina semakin bertambah cepat. *Land for Peace* sendiri merupakan suatu gagasan dalam proses perdamaian Israel-Palestina. Gagasan ini merupakan gagasan utama dalam upaya menciptakan perdamaian diantara kedua belah pihak bertikai. Gagasan *Land For Peace* dalam proses perdamaian Israel-Palestina mengacu pada Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 242 Tahun 1967 dan Resolusi DK PBB No. 338 Tahun 1973.

Resolusi DK-PBB No. 242 yang dikeluarkan tanggal 22 November 1967 adalah sebagai berikut (Rahmanillah 2009):

1. Penarikan mundur Israel dari teritorial yang didudukinya dalam peperangan terakhir (*six days war*);
2. Penghapusan keadaan perang dan sikap bermusuhan, menghormati dan mengakui kedaulatan masing-masing wilayah, integritas teritorial, kemerdekaan politis setiap negara di Timur Tengah, serta hak mereka untuk hidup damai dan bebas dari ancaman dan kekerasan dalam perbatasan yang diakui dunia internasional.

Sedangkan Resolusi DK PBB No. 338 yang dikeluarkan pada tanggal 22 Oktober 1973, intinya adalah (Rahmanillah 2009):

1. Penghentian segera tembak menembak dan manuver militer;
2. Pelaksanaan segera resolusi DK PBB No. 242 Tahun 1967;
3. Perundingan segera demi terciptanya perdamaian yang langgeng dan adil.

Partai Likud berusaha mengangkat isu keamanan sebagai inti dari kampanye dengan mengangkat isu kegagalan Shimon Peres dalam mempertahankan keamanan domestik dan luar negeri di Israel, termasuk melindungi rakyat sipil Israel setelah penandatanganan perjanjian perdamaian dengan Palestina. Adanya serangkaian teror dan kekerasan yang dilakukan kelompok garis keras Palestina seperti Hamas, membuktikan gagal dan lemahnya Shimon Peres dalam menekan pemimpin Palestina, Yasser Arafat untuk menjamin hilangnya segala aksi kekerasan dan terorisme. Selain itu, keberadaan Hamas di Tepi barat dan Hizbullah di Lebanon Selatan serta Otoritas Palestina di Jalur Gaza membuktikan kepada sebagian besar masyarakat bahwa pengorbanan Israel untuk perdamaian hanya memberikan keuntungan bagi bangsa Arab saja tanpa diikuti adanya hasil yang seimbang bagi Israel yaitu jaminan keamanan yang maksimal.

Partai Likud memanfaatkan keterangan Peres yang mengatakan bahwa selama konflik Arab-Israel yang muncul sejak pendirian negara Israel tahun 1948, sikap Palestina telah berubah dengan melakukan penghapusan salah satu isi piagamnya yang menyatakan penghancuran Israel. Akan tetapi, bagi partai Likud yang konservatif, mempertahankan ideologi tradisional untuk mewujudkan negara Israel Raya yang mencakup seluruh wilayah yang dijanjikan yaitu mulai sungai Jordan sampai ke Laut Tengah termasuk Tepi Barat, merupakan hal yang penting untuk dipertahankan. (Rahmanillah 2009)

Kampanye yang dilakukan oleh Partai Likud berhasil membangkitkan kecemasan bagi rakyat Israel yang memandang bangsa Arab akan terus berusaha mengusir Israel dengan alasan bahwa tanah Israel saat ini sepenuhnya milik bangsa Arab. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu berjanji akan meneruskan usaha perdamaian dan menjaga keamanan dengan semua tetangga Arab-Israel dan berusaha hidup berdampingan secara damai dengan negara-negara Arab lainnya, hal itu disampaikan dalam pidatonya ketika terpilih menjadi Perdana Menteri Israel. Dalam pidatonya tersebut, Netanyahu juga menegaskan bahwa ia tidak akan pernah berkompromi dengan Palestina mengenai Yerusalem dan menolak atas kedaulatan Palestina di wilayah tersebut.

Perubahan kebijakan *land for peace* menjadi *land for security* akan membawa dampak yang signifikan bagi proses perdamaian antara Israel dan Palestina. Konsep "*land for security*" kemudian dilanjutkan oleh Ariel Sharon. Dia memiliki obsesi untuk menciptakan keamanan bagi rakyat dan negara Israel. Hal ini diungkapkan dalam artikelnya yang berjudul "*I am for the lasting peace*". (Sharon 2000) Likud akan selalu berusaha memposisikan dirinya di pihak yang menang. Mereka menolak segala konsesi yang akan membuat mereka kalah seperti perundingan perdamaian Oslo dan Wye River. Kedua perundingan ini menuntut adanya pembagian wilayah yang sangat bertentangan dengan partai Likud. Aksi Ariel Sharon mengunjungi Masjid Al-Aqsa pada tahun 2000, merupakan tindakan yang ingin menandai bahwa tanah itu adalah milik Israel.

2. Meminimalisir Jalur Perundingan sebagai Instrumen Perdamaian

Wallensteen dan Sollenberg mengungkapkan dengan sederhana bagaimana sebuah kondisi yang disebut perdamaian. Mereka mengatakan bahwa situasi damai

berarti tidak ada kekerasan bersenjata. Sebuah pandangan konvensional mengatakan bahwa akhir dari sebuah perang adalah ketika satu pihak atau pihak yang lain memperoleh kemenangan militer, atau ketika kedua belah pihak sepakat untuk menarik diri. Tetapi, yang lebih sering terjadi, konflik bersenjata gagal berlanjut tanpa kemenangan militer atau sebuah penyelesaian semata-mata karena pihak-pihak yang bersengketa tidak lagi menginginkan atau mampu melanjutkan pertempuran. Mungkin ada gencatan senjata tetapi pihak-pihak yang bertikai tetap tidak mampu mencapai kesepakatan. (O. R. Hugh Miall 2000)

Ketika pemerintahan Israel berada di bawah kekuasaan partai Buruh, situasi perdamaian yang dijelaskan oleh Wallensteen dan Sollenberg menggambarkan Israel dan Palestina bersedia menjalankan Perundingan Oslo. Namun, ketika Partai Likud mengambil alih kekuasaan di Israel, kesepakatan ini menjadi terhambat dan bahkan peluang usaha untuk melakukan perdamaian menjadi sangat kecil kemungkinannya. (Kompas 1997)

Kebijakan Netanyahu kemudian mengundang reaksi dari PBB. Pada tanggal 23 sampai 25 Maret 1998, Kofi Annan mengunjungi Israel dan Palestina. Dalam kunjungan tersebut, Kofi Annan membahas mengenai kemacetan proses perundingan damai antara Israel-Palestina. Sekjen PBB ini telah mengingatkan Perdana Menteri Israel bahwa formula land for peace adalah landasan bagi perundingan dalam proses perdamaian. Sekjen PBB memahami apa yang menjadi tuntutan Israel dalam masalah keamanan dan mengenai masalah ini, Kofi Annan menghimbau Netanyahu agar tidak meminta terlalu berlebihan terhadap Arafat. Perlu diakui bahwa Arafat telah banyak berbuat untuk itu dan upaya itu harus dibantu. Ditegaskan oleh Sekjen PBB bahwa perdamaian akan

memperkuat keamanan dan keamanan akan memperkuat perdamaian, dan perlu diberikan jalan untuk mencapai tujuan tersebut. (Rahmanillah 2009)

Israel mengesahkan suatu resolusi tanggal 14 Mei 1999, resolusi ini berisi mengenai penolakan untuk menyerahkan setiap bagian dari wilayah Jerusalem Timur di bawah pengawasan Palestina atau di bawah pengawasan internasional. Israel tidak menerima setiap tawaran pembagian atau internasionalisasi Yerusalem, dimana wilayah tersebut secara eksklusif akan tetap berada di bawah kedaulatan negara Israel. Resolusi ini sebagai langkah untuk mengklarifikasi pernyataan Uni Eropa pada awal bulan Maret 1999, bahwa berdasarkan hukum internasional Yerusalem ditetapkan dengan kedudukan terpisah dari Israel. Pernyataan Uni Eropa ini ditanggapi Israel dengan mengeluarkan resolusi tersebut. Pihak oposisi dari Partai Buruh sebagaimana disampaikan oleh ketuanya Ehud Barak mengomentari resolusi yang dikeluarkan oleh Perdana Menteri Netanyahu tersebut sebagai suatu tipu muslihat. (Putra 2000)

Sebagai tokoh konservatif, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tidak tertarik pada proposal "*land for peace*" yang dianut oleh pemerintahan Partai Buruh pada Perjanjian Oslo pada tahun 1993. Melihat hal ini, seharusnya Benjamin Netanyahu menolak segala bentuk perjanjian apapun dengan Palestina. Akan tetapi, pada Oktober 1998, Netanyahu mengambil keputusan untuk bersedia menandatangani suatu kesepakatan damai yang bernama Wye River.

Perundingan, menuntut pengakuan terhadap Resolusi DK-PBB No. 242 dan 338 yang dijadikan landasan *land for peace* mengharuskan Israel menarik diri dari perbatasan pendudukan 1967. Sehingga kosekuensinya antara lain (Putra 2000):

1. Terlepasnya Yerusalem Timur yang menurut ketentuan PBB, termasuk wilayah Palestina;
2. Diakhirinya pendudukan atas Tepi Barat dan Jalur Gaza;
3. Dikembalikannya pengungsi Palestina ke wilayah asalnya di Israel yang dapat mengubah dominasi komunitas Yahudi atas Arab Israel;
4. Dibongkarnya pemukiman Yahudi di tanah pendudukan Tepi Barat dan Jalur Gaza yang akan mendapat ganjalan luar biasa dari para pemukim;
5. Berdirinya negara Palestina merdeka, yang dapat menjadi ancaman masa depan Israel.

Petinggi Likud salah satunya Ariel Sharon tidak ingin berspekulasi dengan perundingan perdamaian karena menurutnya konflik antara Irael dan Palestina berkaitan dengan konsekuensi akan masa depan Israel. Bagi Sharon, tanah yang bisa dimiliki oleh bangsa Palestina merupakan tanah yang diberikan oleh Israel tanpa adanya paksaan atau tekanan apapun baik berupa perang ataupun perundingan. Kalaupun ada pemberian wilayah pendudukan, kemungkinan adalah keputusan Israel secara unilateral. Hal ini dilakukan untuk menjaga national security dan memperlemah posisi politik Palestina.

B. Implementasi Perdamaian Israel terhadap Palestina pasca kemenangan Partai Likud dalam pemilu tahun 2013

Seperti yang sebelumnya sudah terjadi, setiap perundingan perdamaian antara Israel dan Palestina digelar, selalu muncul pendapat bernada optimistis ataupun pesimistis. Sangat wajar muncul sikap dan pandangan seperti itu. Ini karena memang sudah berkali-kali perundingan dilakukan sejak berakhirnya perang tahun 1967, tetapi lebih banyak mengalami kegagalan dibanding keberhasilannya, seperti Perundingan Camp David 1978

yang mengakhiri perang Israel dan Mesir. Sementara perundingan perdamaian antara Israel dan Palestina yang bisa dikatakan berhasil meski ditolak oleh Hamas dan kelompok-kelompok lain- adalah Perjanjian Oslo 1993. Perjanjian ini menjadi dasar pembentukan Otoritas Sementara untuk Palestina. Selain itu, kedua belah pihak juga sepakat untuk mengakhiri konfrontasi dan konflik serta saling mengakui hak-hak politik dan keabsahan eksistensi mereka. Setelah itu, nyaris tidak ada hasil dari setiap perundingan perdamaian di antara keduanya.

Menteri Luar Negeri AS John Kerry sebagai penggerak dari perundingan di Jerusalem tampaknya sadar akan hal itu. Karenanya, ia tidak mau mengulangi kesalahan, misalnya kesalahan perundingan tahun 2010 yang macet. Misalnya, jangka waktu perundingan akan panjang, yakni 9 bulan dan perundingan tidak dilakukan para pemimpin tertinggi kedua belah pihak seperti sebelumnya karena jika menemui jalan buntu, tidak bisa dibawa ke tingkat yang lebih tinggi. Perundingan dilakukan oleh para pejabat tinggi: Menteri Kehakiman Israel Tzipi Livni dan perunding Palestina, Saeb Erekat. (Muhamad 2013)

Penghentian pembangunan permukiman juga tidak menjadi prasyarat bagi pelaksanaan perundingan. Itulah sebabnya beberapa hari lalu Israel mengumumkan membangun permukiman baru di Jerusalem setelah pembebasan tahanan Palestina. Terlepas dari semua itu, pokok perundingan kali ini tetaplah mengenai empat hal yaitu Status Jerusalem, perbatasan dan permukiman, pengungsi Palestina, serta keamanan. Keempat isu itu harus diselesaikan untuk tercapainya perdamaian di antara kedua belah pihak. Untuk isu Jerusalem, misalnya, Palestina menginginkan Jerusalem timur sebagai ibu kota, tetapi Israel tidak mau membagi kota itu. Palestina juga menginginkan dipulihkannya garis perbatasan sesuai dengan kondisi seperti pecah perang 1967, namun

Israel belum sepaham. Terkait masalah pengungsi Palestina, Israel menolak gagasan “hak kembali” orang-orang Palestina ke kampung halaman mereka. Israel juga menginginkan pengaturan final yang akan menjamin keamanannya.

Sementara Palestina menginginkan negaranya mendapat jaminan keamanan dari tentara Israel dan tidak ada kompromi soal kedaulatan. Memang banyak persoalan yang belum bisa diselesaikan. Namun, apapun hasilnya nanti, usaha untuk mengupayakan perdamaian tetap harus dilakukan walau sebenarnya perundingan kali ini dilaksanakan ketika tingkat kepercayaan kedua belah pihak di titik paling rendah. Di tengah ketegangan yang tinggi dan rendahnya harapan, juru runding Israel dan Palestina, pada 14 Agustus 2013, melakukan pembicaraan damai di sebuah tempat yang dirahasiakan di Jerusalem. Kedua belah pihak serius melakukan pembicaraan, tetapi belum ada rincian tentang subyek pembicaraan. Keduanya sepakat untuk menahan diri mengungkap informasi dan mencegah kebocoran informasi kepada media. Seorang pejabat Palestina mengatakan, mereka sepakat untuk bertemu setiap pekan, bergantian antara Jerusalem dan kota Jerikho di Tepi Barat.

Pembicaraan damai tersebut dilakukan di tengah rencana Israel membangun permukiman di wilayah pendudukan di Jerusalem Timur dan Tepi Barat. Hal ini membuat para pejabat Palestina marah dan menilai bahwa rencana tersebut justru memperkeruh suasana menjelang pembicaraan damai. Timbul pendapat bahwa Israel terus memainkan politik dua kakinya menjelang perundingan damai dengan Palestina. Saat otoritas Zionis itu melepaskan sejumlah tahanan Palestina, pada waktu bersamaan pula mereka terus memperluas pembangunan permukiman ilegal di tanah pendudukan. Keputusan untuk kembali memperluas permukiman Yahudi itu diumumkan pada 11 Agustus 2013 oleh

Menteri Perumahan Israel Uri Ariel. Dikatakan oleh Menteri Perumahan Israel bahwa pemerintah telah menyetujui pembangunan 1.187 unit rumah baru. Dari jumlah itu, sebanyak 793 unit di antaranya akan dibangun di Jerusalem Timur. Sedangkan, 394 unit akan didirikan di Tepi Barat, termasuk di wilayah Efrat, Ariel, dan Maaleh Adumim. Pengumuman itu dilakukan hanya beberapa jam setelah Israel merilis 26 nama tahanan Palestina yang akan dibebaskan. Secara keseluruhan, Israel berjanji akan membebaskan 104 tahanan dalam empat tahap sebagai bagian dari “kompromi” perundingan damai dengan pihak Palestina yang diperantarai AS. (Muhamad 2013)

Pembebasan tahanan merupakan isu yang sangat kontroversial di Israel, terutama menyangkut tahanan yang terlibat pembunuhan warga Israel. Amerika Serikat yang menginisiasi dialog tidak bersikap tegas atas rencana Israel. Meskipun mengecam pembangunannya, menurut pihak AS, keputusan Israel bukanlah alasan untuk menggagalkan perundingan. Menteri Luar Negeri AS John Kerry berharap Palestina tidak menanggapi persoalan ini secara berlebihan sehingga menggagalkan proses perundingan. Sikap AS terhadap tanah pendudukan Israel, kata Kerry, tetap tidak berubah. Kebijakan Israel membangun permukiman tidak sah. Namun, menurut Kerry, cara terbaik untuk memecahkan persoalan pelik ini, yakni dengan menyelesaikan masalah keamanan dan perbatasan. Juru Bicara Kementerian Luar Negeri AS di Washington Marie Harf mengatakan, AS merasa sangat prihatin dengan pengumuman rencana pembangunan permukiman Yahudi tersebut, karena, rencana ini bisa menimbulkan kekhawatiran dan kecurigaan pihak Palestina.

Pihak Palestina sudah tentu mengecam pembangunan permukiman tersebut. Negosiator senior Palestina Saeb Erekat menilai, sikap Israel tersebut memupuskan solusi

antara kedua pihak. Israel membantah kritik tersebut. Menurut Juru Bicara PM Netanyahu, Mark Regev, setiap inisiasi perdamaian, pihaknya selalu mengusulkan tanah pendudukan sebagai wilayah Israel. Juru Bicara Uni Eropa dan Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon mengkritik rencana Israel. Rusia bahkan menggambarkan tindakan Israel sebagai langkah kontra-produktif yang merumitkan suasana pembicaraan. Sekitar 500.000 orang Yahudi tinggal di lebih dari 100 permukiman yang dibangun sejak pendudukan Israel pada 1967 di Tepi Barat dan Jerusalem Timur. Permukiman dianggap ilegal berdasarkan hukum internasional, meskipun Israel menentang keputusan itu. Jerusalem Timur telah dianeksasi oleh otoritas Zionis dalam Perang Timur Tengah tahun 1967.

Setelah 7 tahun terjadi perpecahan, Pada tanggal 23 April 2014, Hamas sepakat untuk mengadakan rekonsiliasi dengan faksi utama Palestina lainnya yaitu Fatah. Adanya rekonsiliasi ini menyebabkan terbentuknya Pemerintahan bersatu Palestina yang deklarasi nya dilakukan pada 2 Juni 2014. (Lynfield 2014) Israel ternyata menanggapi dinamika politik dalam negeri di Palestina dan mengumumkan bahwa pemerintahnya tidak akan bernegosiasi mengenai perdamaian apapun dengan pemerintahan Palestina yang baru dan akan mengambil tindakan punitif atau menghukum Palestina atas tindakannya tersebut. (Hatuqa 2014) Selain menyatakan bahwa terjadinya rekonsiliasi antara Hamas dan Fatah akan menyebabkan kuatnya gerakan terorisme di Palestina dan Israel (Estrin 2014), satu hari sebelum adanya deklarasi bersatunya Hamas dan Fatah, Pihak Israel juga menyerukan bahwa rezim Internasional tidak boleh mengakui keberadaan mereka. Namun, Uni Eropa, PBB, Amerika Serikat, Cina, India, Ruissia dan Turki telah sepakat untuk bekerjasama dengan pemerintahan Palestina yang baru demi tercapainya

perdamaian. Perjanjian ini memiliki dampak besar bagi perputaran negosiasi dan upaya perdamaian antara [Otoritas Palestina](#) yang dipimpin [Mahmoud Abbas](#) dan Israel. Sesaat setelah pengumuman perjanjian ini, Israel melancarkan serangan udara ke Jalur Gaza utara yang melukai empat orang. (Barzak 2014) Israel telah memperingatkan sebelumnya bahwa perjanjian ini tidak sesuai dengan perdamaian Israel–Palestina dan Abbas harus memilih antara perdamaian dengan Hamas dan perdamaian dengan Israel. Saat kesepakatan rekonsiliasi ditandatangani sehingga membuka jalan bagi pembentukan pemerintahan baru, Netanyahu memimpin rapat kabinet keamanan yang akhirnya memutuskan untuk mengizinkan Netanyahu menjatuhkan sanksi kepada Otoritas Palestina.

Eskalasi konflik antara Israel–Palestina kembali dimulai pada tahun 2014 setelah terjadi serangkaian peristiwa. (Kershner 2014) Peristiwa-peristiwa ini mencakup berlanjutnya pemblokiran Jalur Gaza oleh pemerintah Mesir dan Israel, terjadinya serangan roket dari Gaza, kegagalan perundingan perdamaian yang disponsori oleh Amerika Serikat, upaya pembentukan pemerintahan koalisi oleh faksi-faksi bersaing di Palestina, penculikan dan pembunuhan tiga remaja Israel, penculikan dan pembunuhan seorang remaja Palestina, penangkapan hampir seluruh pemimpin Hamas di Tepi Barat oleh Israel, dan meningkatnya serangan roket ke Israel setelah perjanjian pencabutan blokade Gaza secara bertahap tidak dipenuhi karena Hamas melanggar kesepakatan gencatan senjata sebelumnya. (The Economist 2014)

Pada tanggal 6 Juli 2014 malam, serangan udara Israel di Gaza menewaskan tujuh militan Hamas, (Rabbani 2014) sementara Hamas membalas dengan meningkatkan serangan roketnya ke Israel dan menyatakan bahwa seluruh warga Israel merupakan

target yang sah. (Toameh 2014) Pada tanggal 8 Juli 2014, Pasukan Pertahanan Israel (IDF) melancarkan Operasi Perlindungan Tepi (*Operation Protective Edge*) di Jalur Gaza. (Bear 2014)



Gambar 0.1 Serangan Roket ke Jalur Gaza

Tanggal 13 Juli 2014, militer Israel melaporkan bahwa lebih dari 1.300 serangan udara Israel telah dilancarkan ke Gaza, sementara lebih dari 800 roket telah ditembakkan dari Gaza ke Israel. (Voice of America 2014) Keesokan harinya, tanggal 14 Juli, Mesir mengumumkan inisiatif gencatan senjata antara Israel dan Palestina yang semakin memanas. Pemerintah Israel menerima usulan ini dan menghentikan serangan untuk sementara pada 15 Juli 2014 pagi. Akan tetapi, semua faksi Palestina, termasuk Presiden Palestina Abbas, mengumumkan bahwa mereka tidak diberitahu soal inisiatif Mesir ini dan baru mengetahuinya lewat media. Hamas beserta faksi Palestina lainnya menolak perjanjian yang ada. (Al Jazeera 2014) Pada tanggal 16 Juli, Hamas dan Jihad Islam menawarkan gencatan senjata selama sepuluh tahun kepada Israel dengan sepuluh syarat, sebagian besar menyinggung soal diakhirinya pemblokiran Jalur Gaza.

Serangan ini merupakan operasi militer paling mematikan yang pernah terjadi di Gaza sejak Intifada Kedua, meskipun jumlah korban tewas dan persentase militan yang tewas masih belum jelas. (Stotsky 2014) Menurut Kementerian Kesehatan Gaza ada sekitar 1.880 warga Palestina tewas (William James 2014) dan 10.000 lainnya cedera. Dari jumlah tersebut, 398 di antaranya adalah anak-anak, 207 wanita dan 74 merupakan manula. Laporan awal untuk United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) dari Protection Cluster memperkirakan bahwa 1.176 dari 1.717 korban tewas yang identitasnya sejauh ini sudah dikenali merupakan warga sipil, 573 di antaranya (33% dari total korban tewas) adalah wanita atau anak-anak. (UNOCHA 2014) Israel bersikukuh bahwa sedikitnya 47% korban tewas di Gaza adalah kombatan bukan warga sipil. (Williams 2014)



Gambar 0.2 Penyerangan Sekolah milik PBB oleh Israel

Di sisi lain, 64 tentara IDF, dua warga sipil Israel, dan seorang pekerja dari Thailand tewas. Pasukan Pertahanan Israel menyatakan bahwa Hamas menggunakan

warga sipil sebagai "perisai hidup", (Josef Federman 2014) dan pada tanggal 17 Juli 2014, *United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East* (UNRWA) mengutuk keras kelompok yang menyimpan senjata di salah satu sekolah yang dibangun oleh UNRWA. Pada 22 Juli, Uni Eropa mengutuk semua seruan kepada penduduk sipil Gaza untuk merelakan dirinya sebagai perisai hidup. Hamas membantah kabar bahwa pihaknya menggunakan perisai hidup.

Sekitar 44% teritori Jalur Gaza ditetapkan sebagai zona kosong (*no-go zone*) oleh militer Israel. (Hubbard 2014) Per 5 Agustus 2014, laporan OCHA menyatakan bahwa di Jalur Gaza, 520.000 warga Palestina (kurang lebih 30% populasi Gaza) menjadi pengungsi, 273.000 di antaranya mengungsi di 90 sekolah. (UNOCHA 2014) UNRWA telah mengerahkan segala kemampuannya untuk memfasilitasi para pengungsi, dan kepadatan pengungsi meningkatkan risiko terjadinya wabah. 1,5 juta penduduk Gaza terkena dampak terbatasnya dan/atau berkurangnya persediaan air, 26 fasilitas kesehatan rusak (UNOCHA 2014) 968 rumah yang dihuni oleh 64.650 orang hancur total atau rusak parah, dan rumah milik 33.100 orang rusak namun masih bisa ditinggali. Di seluruh Jalur Gaza, penduduknya hanya mendapat pasokan listrik selama tiga jam per hari. Penghancuran satu-satunya pembangkit listrik di Gaza sangat memengaruhi keadaan kesehatan masyarakat dan mengurangi layanan air dan sanitasi; rumah sakit semakin bergantung pada generator listrik. Lebih dari 485.000 pengungsi dalam negeri membutuhkan bantuan pangan darurat.